IMPLEMENTASI**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Rosa Erna Sari**

Dra. Hj. Nanik Pujiastuti, M.Si dan H. Marsuq, S.Sos, M.Si

1Administrasi Negara, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

2Dosen Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75124, Indonesia.

**ABSTRAK**

Standar Operasional Prosedur (SOP) bisa diartikan sebagai suatu petunjuk organisatoris yang menetapkan suatu tindakan baku. SOP berisi petunjuk yang menjelaskan cara yang diharapkan dan diperlukan oleh pekerja/petugas dalam melakukan/menyelenggarakan pekerjaan mereka.

Dalam pemerintahan, penerapan SOP merupakan sebuah keharusan dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Pemerintahan dan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012. Dalam hal pemerintahan, SOP bermanfaat untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat.

Penerapan SOP dalam pelayanan pemerintahan perlu diperhatikan antara struktur organisasi dan pembagian tugas dalam pemerintahan serta dikaitkan dengan beberapa hal penting dalam penerapan SOP, yakni: efisiensi, konsistensi, minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja (pegawai), peta kerja dan batasan pertahanan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul, yakni: “Implementasi Standar Operasional Prosedur dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat*.”*

**Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur dan Pelaksanaan Tugas**

1. **PENDAHULUAN**

Pada tahun anggaran 2018 ini Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan berbagai pembangunan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah daerah sangat pesat khususnya pembangunan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang tidak dapat dipungkiri sangat mendukung meningkatnya pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Percepatan pembangunan ini bertujuan pula agar masyarakat dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Menciptakan sebuah organisasi yang efektif dan efisien memang tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, perlu ada komitmen dan kerja keras dalam membangun organisasi tersebut; misalnya lembaga pemerintah, untuk menciptakan lembaga pemerintah yang profesional, efektif dan efisien tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan dalam lembaga pemerintah didalamnya terdapat banyak kepentingan yang berbeda, budaya serta perilaku setiap individu di dalamnya tentunya juga berbedabeda.6 Oleh sebab itu pemerintah Indonesia ini melakukan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) dalam setiap kegiatan tata kelola lembaga pemerintah. Berdasarkan Permenpan& RB Nomor 35 Tahun 2012 Pasal 3: “standard operasional prosedur administrasi pemerintahan (SOPAP) adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Salah satu aspek penting sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja instansi pemerintah yang profesional, efektif dan efisien dalam melaksanakan program kerjannya adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) di seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Standar operasional prosedur adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaaan, waktu, pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan.

Implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) dalam lembaga pemerintah diharapkan dapat mengubah citra lembaga pemerintah yang selama ini dianggap selalu lamban dan berbelit-belit dalam hal pelayanan pada masyarakat. Selain itu, diharapkan juga dapat memberbaiki kinerja jajaran birokrasi pemerintahan yang ada di Indonesia ini agar tidak tertinggal dengan negara-negara lain dalam berbirokrasi.

Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan dinilai penting karena Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) dapat menjadi pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsinya. Standar operasional prosedur juga dapat dijadikan alat penilaian kinerja instansi pemerintah.

Bahwa pelaksanaan SOP dalam penyelengaraan pemerintahan memiliki multi fungsi baik sebagai alat deteksi potensi penyimpangan dari tugas pokok dan fungsi; sebagai alat koreksi atas setiap penyimpangan yang terjadi; sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan kinerja setiap satuan kerja ke tingkat yang lebih efektif, efisien, profesional, transparan dan handal.” Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Kutai Barat ditetapkan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik.

Selain itu, bidang sekretariat secara umum mempunyai tugas administrasi yang mewakili kelembagaan secara menyeluruh daripada bidang lainnya yang telah fokus pada bidang pemerintahan yang sejalan dengan Permenpan Nomor 21 Tahun 2008 yaitu tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur (SOP) administrasi pemerintahan

Melihat pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung kemajuan suatu organisasi tersebut harus berusaha untuk mendapatkan organisasi atau instansi yang tepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Berkaitan dengan ini maka tindakan yang paling tepat untuk dilakukan adalah mengadakan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini amat penting dan tidak boleh diabaikan karena bisa saja terjadi tenaga kerja yang diperoleh Dinas tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Terpilihnya pegawai yang tepat dapat memperkokoh suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Keliru memilih pegawai, dapat sangat merugikan baik dari segi waktu, biaya maupun semangat kerja. Dalam melaksanakan seleksi, suatu organsasi sebaiknya menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon tenaga kerja sebelum mereka ditolak atau diterima. Hal ini bertujuan agar seleksi bisa dilaksanakan subyektif mungkin. Setelah melaksanakan seleksi, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah penempatan, yaitu menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Tenaga kerja yang ditempatkan pada jabatan tertentu hendaknya sesuai dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Hal ini dilakukan oleh Dinas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada dasarnya setiap organisasi atau Dinas yang didirikan mempunyai tujuan bahwa kelak kemudian hari akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat didalam ruang lingkup yang baik. Luas sempitnya tujuan tergantung dari besar kecilnya organisasi yang bersangkutan. Suatu organisasi atau Dinas yang memiliki tujuan yang luas, jumlah kerjanya pun akan menjadi lebih banyak dan beragam. Dalam keadaan yang demikian, suatu organisasi atau Dinas dituntut mampu menyediakan sejumlah pegawai sesuai dengan jenis dan beban kerja yang ada. Akan tetapi pegawai yang ada belumlah cukup sehingga perlu adanya pembagian tugas agar masing-masing pegawai memperoleh tugas sendiri-sendiri untuk dipertanggung jawabkan,

Dalam hal ini dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan diterapkan dilingkungan dinas menjadi lebih baik untuk kemajuan organisasi maupun instansi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Adapun tugas kepala dinas tersebut adalah melaksanakan urusan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan melakukan tugas lainnya yang diberikan Bupati.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebuah petunjuk buku yang sifatnya tertulis. SOP menurut pandangan Tambunan (2008 : 79) adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan, bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi berjalan secara efektif, konsisten, standard dan sitematis.

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan pemerintahan, hal tersebut dapat ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat. Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah.

Dalam pemerintahan, penerapan SOP merupakan sebuah keharusan dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Pemerintahan dan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012. Dalam hal pemerintahan, SOP bermafaat untuk membantu kinerja pemerintah untuk lbih efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat.

1. **RUMUSAN MASALAH**

Bagaimanakah Implementasi Standar Operasional Prosedur dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Kutai Barat sudah dijalankan ?

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

Data Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kualitatif yaitu teknik analisis interaktif, yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut :

a. Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah meyederhanakan data dalam bentuk yang mudah di baca dan di pahami, bahwa analisa data pada penelitian kualitatif dilakukan secara mengalir dari tahap awal hingga penarikan kesimpulan sehingga disebut model alir.

b. Mendeskripsikan data, biasanya dalam bentuk frekuensi, ukuran tendensi sentral maupun dispresi, sehingga dapat dipahami karakteristik datanya.

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Hasil Penelitian**

Untuk merealisasikan rencana kerja pembangunan daerah bidang pekerjaan umum maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan pengembangan infrastruktur seperti pembukaan, pembangunan dan peningkatan badan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan dan pemeliharaan drainase, pembangunan dan rehabilitasi bangunan, pengadaan dan peningkatan penerangan listrik, pengadaan air bersih dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut Dinas Pekerjaan Umum mengalami kendala sebagai berikut :

1. Masih belum lengkap dan validnya data dasar / data base pembangunan bidang pekerjaan umum sehingga belum tersedianya data yang akurat untuk menyusun rencana pembangunan;
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus bidang Pekerjaan Umum.
3. Belum maksimalnya perencanaan dan penerapan tata-bangunan dan lingkungan kawasan Kabupaten.
4. Ketersediaan infrastruktur dan layanan ke-PU-an belum merata ke semua golongan masyarakat (umumnya, golongan masyarakat yang berada di daerah terisolir dan di kawasan perbatasan, belum mendapat layanan yang setara dengan layanan bagi golongan masyarakat yang tinggal di kawasan pemerintahan).

**4.2.1**. **Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Kutai Barat**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari para responden, diketahui bahwa pelaksanaan SOP dalam pemerintahan, telah dipraktekkan di lokasi penelitian, dalam hal ini adalah masyarakat. Dalam hal Prosedur Pelayanan diketahui bahwa hal itu telah dilakukan dengan baik.

* 1. **Pembahasan**

**4.3.1. Implementasi** **terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang di emban oleh Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**4.3.2. Faktor penghambat pelayanan**

Faktor-faktor yang menghambat pelayanan pada bidang pekerjaan umum adalah :

1. Terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tidak semua rencana kegiatan pembangunan daerah dapat segera dilaksanakan untuk percepatan pembangunan masyarakat;
2. Masih lambatnya pengesahan DPA karena adanya perubahan kegiatan-kegiatan;
3. Belum tersedianya data dasar atau data base pembangunan bidang pekerjaan umum yang belum lengkap dan belum akurat sehingga Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang pekerjaan umum yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan;
4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus dalam bidang pekerjaan umum;
5. Terisolirnya daerah perbatasan dan daerah terpencil karena letak geografis yang sulit dijangkau sehingga hasil pembangunan masih belum merata.

**4.3.2. Faktor pendorong pelayanan**

Selain faktor-faktor penghambat diatas terdapat pula faktor pendorong pelayanan bidang pekerjaan umum kepada masyarakat seperti :

1. Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat yang memprioritaskan peningkatan pembangunan infrastruktur berbasis kampung dan kecamatan;
2. Selain itu komitmen pemerintah daerah meningkatkan pengembangan SDM berbasis kampung;
3. Adanya peningkatan anggaran bidang pekerjaan umum dari tahun sebelumnya.

**4.3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat belum tuntas dipengaruhi oleh kebijakan/peraturan Menteri Kehutanan sehubungan dengan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) yang belum terbit, dan penetapan kawasan strategis yang ada di RTRWN dan RTRW Propinsi yang juga belum terbit berkaitan dengan tapal batas wilayah kawasan strategis.

Penanganan penataan bangunan gedung dan lingkungan telah diupayakan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan di beberapa kecamatan di Kutai Barat.

**4.3.4. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**4.3.4.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehinggar umusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Berdasarkan misi dan faktor–faktor kunci keberhasilan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat menetapkan tujuan yang sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian ke PUan demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim).
2. Meningkatkan kualitas lingkungan ke PUan dan cakupan pelayanan (infrastruktur) Bidang Bina Marga, Permukiman (Cipta Karya), Sumber Daya Air dan Bidang Penataan Ruang dan Perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal (wilayah terisolir dan kawasan perbatasan) dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

**4.3.4.2. Sasaran**

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja.

Adapun sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

* + - 1. Memenuhi kebutuhan infrastruktur di bidang jalan, jembatan dan drainase sebagai pengembangan fasilitas jalur penghubung daerah terisolir yang mempunyai peran terhadap pergerakan perekonomian kerakyatan.
      2. Melakukan pengembangan, penataan dan pengelolaan lingkungan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan lestari berdasarkan fungsi kawasan dan konsep keruangan.
      3. Memenuhi kebutuhan infrastruktur di bidang sumber daya air dengan melakukan pemeliharaan/pengelolaan kawasan perairan (danau, sungai, maupun rawa) serta melakukan pengembangan daerah irigasi dalam rangka mendukung ketahanan penyediaan pangan.
      4. Menerapkan sistem pemerintahan ke-PU-an yang baik dan efisien, dengan menciptakan tata kerja yang efektif serta mengembangkan SDM yang profesional.

**4.3.4.3. Program dan Kegiatan**

Target Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat untuk Tahun Anggaran 2020 dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Periode 2016 – 2021**.**

**4.3.4.4. Penerapan SOP Dalam kegiatan pembangunan**

Kinerja organisasi publik dipengaruhi oleh faktor-faktor yang beraneka ragam. Dalam konteks penerapan SOP dalam lingkungan organisasi publik, Winarno (2012 : 207) mengatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan pengaruh implementasi kebijakan SOP terhadap kinerja pegawai di lingkungan organisasi adalah struktur organisasi.

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya *(standard operating procedures, SOP)*. Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi. Selanjutnya Winarno (2012 : 209) menyatakan bahwa SOP memiliki manfaat bagi organisasi-organiasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program-programnya.

Dari pandangan Winarno diatas tentang pengaruh implementasi atau penerapan kebijakan SOP dalam orgniasasi ini, diketahui bahwa implementasi kebijakan SOP dalam organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai di pemerintahan. Teori diatas sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum adalah salah satu pemerintahan tingkat bawah yang melaksanakan tugs di bidang pemerintahannya dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang diintruksikan Menteri Pemerintahan dan Aparatur Negara. Penerapan ini menyebabkan sehingga semua urusan pemerintahan dalam hal pelayanan kepada masyarkat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip SOP.

Sesuai dengan kriteria SOP, pemerintah yang menerapkannya dalam pembangunan . Hal itu nampak dalam prosedur pelayanan yang ditemukan dalam observasi dan wawancara serta studi dokumentasi.

**V.PENUTUP**

**5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa

1. Standar operasional prosedur sebagai alat penilaian kinerja berorientasi pada penilaian kinerja internal kelembagaan, terutama dalam hal kejelasan proses kerja di lingkungan organisasi termasuk kejelasan unit kerja yang bertanggungjawab, tercapainya kelancaran kegiatan operasional dan terwujudnya koordinasi, fasilitasi dan pengendalian yang meminimalisir tumpang tindih proses kegiatan di lingkungan sub-sub bagian dalam organisasi pemerintahan Kabupaten Kutai Barat..
2. Pelayanan tentang permohonan pembangunan misalkan : perbaikan jembatan, irigasi, jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum di bidang Pengaturan Dan Pemangunan Tata Ruang Dan Bangunan , pelayanan legalisasi surat, pelayanan pembuatan surat dinas dalam rangka penerapan SOP di bidang pemerintahan sudah dilakukan dengan baik dan mendatangkan hasil yang memuaskan, yakni terciptanya ketertiban dan kemudahan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

**5.2. SARAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka ada beberapa saran dan atau implikasi yang dikemukakan, yakni :

1. Karena selama ini, penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Kutai Barat umumnya didasarkan pada standar eksternal padahal sebagai bentuk organisasi publik, instansi pemerintah memiliki karakteristik khusus yakni sifat birokratis dalam internal organisasinya. Oleh karena itu apabila pedoman yang sifatnya internal ini jika digabungkan dengan pedoman eksternal (penilaian kinerja organisasi publik di mata masyarakat) berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, maka akan mengarah pada terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kecamatan yang handal.
2. Hasil kajian menunjukkan semua satuan unit kerja instansi pemerintah Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Kutai Barat memiliki SOP, karena itu seharusnyalah setiap satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah memiliki standar operasional prosedur sebagai acuan dalam bertindak dan bisa mempermudah kerja para pegawai Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Kutai Barat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Menteri Pemerintahan dan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Redaksi Citra Umbara, *Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor32 Tahun 2004*, Tentang OTODA 2004-2013, (Bandung: Citra Umbara,2013).

Tanjung, Adrian dan Bambang Subagjo, *Panduan Praktis Menyusun StandardOperasional Prosedur (SOP) Instansi Pemerintah,* (Yogyakarta: TotalMedia, 2012)

Eko Maulana Ali*,*(2012:192) *Kepemimpinan Transformasional dalam birokrasipemerintahan.*

Goggin, Malcolm. L., Ann O’M. Bowman, James P. Lester, dan Laurence J. O’Toole Jr. (1990). *Implementation Theory and Practice: toward a thirdgeneration.* (Glenview: Sctott, Foresman/Litte, Brown.USA).

Koentjaraningrat, “*Kamus Istilah Antropologi”*. (Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1984).

Lincoln, Yvona S, dan Egon G., Guba, *Naturalistic Inquiry*, (Beverly Hills: Sage Publications, 1985).

Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007).

Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik,* (Yogyakarta: Gava Media, 2012).

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah DiIndonesia,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Tanjung, Adrian dan Bambang Subagjo, *Panduan Praktis Menyusun StandardOperasional Prosedur (SOP) Instansi Pemerintah,* (Yogyakarta: TotalMedia, 2012).

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik; Teori, Proses, dan Studi Kasus (Edisi dan RevisiTerbaru),* (Yogyakarta: Caps, 2012).

**Sumber-sumber lain :**

http://puspiptek.ristek.go.id/media.php?module=detailberita&id=1948-bimbingan-teknis-penyusunan-standar-operasional-prosedur-sop.html Peraturan Menteri Pemerintahan dan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Redaksi Citra Umbara, *Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor32 Tahun 2004*, Tentang OTODA 2004-2013, (Bandung: Citra Umbara,2013).

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pemda UU RI No. 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

# Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Ismail Nawawi, 2009, Perilaku Administrasi, ITS Press, Surabaya, hal. 30-31

15 Sondang P. Siagian, 1992, Kerangka Dasar Ilmu Administrasi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 2 16 GK. Manila, 1996, Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 14 17Meity Taqdir Qodratillah, dkk, 2011, Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, hal. 404 18 Ricky W. Griffin, 2004, Manajemen, terj. Gina Gania,Erlangga, Jakarta, hal. 209

9Darmono, 2007, Pengembangan Standard Operating Prosedure untuk Perpustakaan Perguruan Tinggi, Jurnal FKP2T, Tahun 2, No 1, hal. 32 20 A. Jalaluddin Sayuti, 2012, “Pentingnya Standar Operasional Prosedur Kerja untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan dalam Perusahaan,” Jurnal Ilmiah (online), Vol. IV, No.3, diakses pada 05 Desember 2013 dari http://portal.kopertis2.or.id:8080/jspui/bitstream/123456789/223/1/1.JALALUDIN.pdf 21Kencana Bayu Aji, 2012, Pedoman Penyusunan SOP, diakses pada Desember 2013 dari http://www.slideshare.net/mobile/kencanabayuaji/pedoman-penyusunan-sop. 22Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB) Nomor 35, Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, hal 2-3